

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Organisasi Islam seperti PWNU DKI berfungsi sbagai lembaga pendidikan agama dan lembaga sosial (dakwah). Peran PWNU DKI sebagai lembga dakwah yang menanamkan nilai-nilai ilmu agama dan kesusilaan diperhatikan para poltisi khususnya yang berasal dari partai politik agama Islam. Dengan demikian marwah organisasi NU sangat dijunjung tinggi oleh paslon Jokowi-Maruf beserta timsesnya karena organisasi NU berinteraksi langsung dengan masyarakat yang berdampak pada perolehan suara yang besar.

Keterlibatan kiai sebagai figur sentral organisasi NU dalam politik harus disikapi dengan serius. Hal ini karena politik Indonesia dipahami penuh dengan fragmentasi sementara, sedangkan kiai dipahami sebagai pribadi dengan misi ketuhanan yang berlaku tanpa batas waktu. Misi moral dan agama sangat berbeda dengan misi moral dan politik. Misi moral dan agama didasarkan pada citra Tuhan, dan politik adalah duniawi. Duniawi yang dimaksud terkait dengan posisi kekuasaan. Maka daripada itu, jika ada politisi yang berhasil mendapatkan misi moral dan politik yaitu mendapatkan posisi kekuasaan yang diinginkan dengan bantuan kiai mereka juga harus bisa memberikan timbal balik dengan membantu misi kiai yaitu moral dan agama. Bantuan yang diberikan seputar kebutuhan misi yang dilakukan oleh kiai.

Politik kiai adalah politik moral, bukan berorientasi pada kekuasaan. Keterlibatn kiai dalam kancan poltik tidak brarti bahwa kiai akan berpartisipasi secara langsung dalam mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun kiai masih diperbolehkan berpolitik, namun tidak memiliki orientasi pada kekuasaan, mlainkan bertujuan untuk menanamkan nlai-nlai moral bagi kecerdasan dan pemberdayaan umat dan masyarakat. Kerap kali ketika kiai dalam politik menjadi suatu masalah. Namun, menurut penulis msalahnya terletak pada penggunaan otritas dan legitimasi, bukan pada sifat keterlibatan kiai dalam poltik yang sebenarnya. Jadi pertanyaannya adalah

apakah ada “penyalahgunaan kekuasaan” ketika kiai dalam politik?. Selama tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, politik kiai tidak masalah, justru sangat dibutuhkan karena kiai tidak berorientasi pada kekuasaan dan mementingkan kesejahteraan umat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul: **ANALISIS PERAN DUKUNGAN POLITIK PWNU DKI TERHADAP PASANGAN JOKOWI-MA'RUF PADA PILPRES 2019 DI DKI JAKARTA.**

Kesimpulan yang berisi uraian singkat dari hasil penelitian mengenai relasi patron-klien yang terbangun antara pasangan Jokowi-Maruf dan Pasangan Jokowi-Maruf, saran-saran yang berisi masukan yang sifatnya membangun. Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan konsep organisasi NU dan pasangan calon serta teori patron klien yang dikemukakan oleh James C. Scott (1972) untuk mengetahui bagaimana relasi kuasa antara PWNU DKI serta Pasangan Jokowi-Maruf serta faktor apa saja yang menjadikan keduanya memiliki relasi. Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

Relasi antara Pasangan Jokowi-Maruf dan PWNU DKI serta merupakan bentuk afiliasi yang bersifat individual (anggota partai kepada kiai) tanpa adanya intervensi secara langsung dari partai politik. Bentuk relasi antara partai politik dan pondok pesantren terbangun dikarenakan adanya sebuah ikatan bersifat kekuatan politik yang dimiliki oleh Pasangan Jokowi-Maruf yang mengedepankan paham Agama Islam, memberi tempat terhormat kepada tokoh agama, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, berpegang teguh pada tradisi santri, memiliki kesadaran pluralisme yang tinggi, terbuka dan inklusif.

Pemilu sebagai sistem yang memang harus dilalui oleh basis masa tertentu agar dapat terlibat dalam politik secara aktif, dan sudah menjadi tugas para aktor tersebut. Fungsi para aktor tersebut terhadap negara dan rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Jika PWNU DKI memiliki ide dan ingin menyalurkannya ke dalam sistem bernegara maka harus melewati partai politik karena Indonesia menganut sistem demokrasi yang idealnya partai

politik sebagai penyalur aspirasi. Sebagai partai politik ia juga membutuhkan kader untuk representatif di pemerintahan diperkuat dengan PWNU DKI yang memiliki visi misi serta historis yang cukup erat dalam pemenangan pasangan Jokowi-Maruf itu sendiri sehingga PWNU DKI cukup di prioritaskan alurnya PWNU DKI bisa memberikan idenya kepada negara melalui Jokowi-Maruf dan mendapatkan sumber daya manusia unggul dari stake holder PWNU DKI lalu, visi misi yang sama berupa kader untuk melanjutkan estafet mengembangkan kemaslahatan umat menjadi mudah. Analogi nya sama seperti recruitment pegawai kerja di masyarakat umum yang membutuhkan pegawai dari kerja sama antara si perusahaan atau lembaga dengan pendidikan atau sekolah yang bergerak di bidang dan memiliki visi misi yang sama. Begitu pula Jokowi-Maruf yang memiliki satu visi misi pengembangan masyarakat berbasis NU, dengan demikian Jokowi-Maruf merapat ke NU yang memang program program pengembangan masyarakat bergerak di bidang agama serta berbasis NU.

Fenomena Patron Klien kerap kali di miripkan dengan fenomena politik elektoral. Namun, dalam penelitian ini penulis mengemukakan sebuah kesimpulan bahwa fenomena yang terjadi dalam penelitian yang penulis lakukan bukanlah fenomena politik elektoral. Menurut Aspinall & Sukmajati (2015) dalam mengkaji fenomena politik elektoral cenderung terdapat faktor partai, dan figur kandidat (Aspinall & Sukmajati, 2015, p. 6). Sedangkan, patron klien sendiri terdapat tiga poin penting yang menjadi dasar hubungan patron-klien. Pertama, adanya timbal balik keuntungan yang tidak seimbang. Kedua, terdapat hubungan yang menjaga loyalitas seperti kesetiaan dan kepatuhan. Ketiga, terdapat hubungan yang intensif antar patron dan klien atau hubungan yang terus menerus (Aspinall & Sukmajati, 2015, p. 4-5). Merujuk pada poin tersebut bahwa terdapat hubungan patron dan klien yang terbangun antara PWNU DKI dengan Jokowi Maruf sebagaimana mana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Faktor-faktor yang memengaruhi relasi patron-klien antara PWNU DKI dengan pasangan Jokowi-Maruf antara lain adalah, karena faktor keterhubungan yang sudah terjalin sejak lama, budaya yang selaras, kesamaan

ideologi yaitu agama Islam, hubungan timbal balik dari keduanya, kemudian adanya kepentingan, relasi atau hubungan yang tidak terlepas dari unsur saling keterkaitan akan kepentingan. Kenyataan ini sesuai dengan apa yang digagas oleh James Scott di dalam teori Patron-Klien. Hal ini di mana menurut Scott, patron merupakan individu yang berada dalam kedudukan untuk membantu klien-klien. Menurut Scott dalam teorinya tersebut seseorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi kepada kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya. Fakta penelitian menyimpulkan bahwa sesuatu yang diberikan oleh para Kyai NU sebagai patron adalah basis dukungan kepada klien yakni Jokowi-Maruf. Kemudian sebagai klien, Jokowi-Maruf akan membalas dengan menawarkan bantuan atau perkhidmatan yang diperlukan oleh patron yaitu PWNU DKI.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Berdasarkan dengan hasil penelitian, penulis dilapangan melihat bagaimana perlunya NU sebagai lembaga agama dan dakwah yang berlandaskan paham agama agar mempunyai relasi politik yang terbangun bukan berdasarkan politik yang bersifat matrealistik tetapi berada pada tataran yang lebih bijak.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai cerminan bagi organisasi NU dalam membangun sebuah relasi serta penentuan kriteria seorang pemimpin dan pemenuhan hak serta kewajiban dalam kerangka Negara yang Demokratis.
3. Partai Politik dinilai sebagai wadah demokratis, sewajarnya cerminan relasi yang terbangun dari PWNU DKI dan Jokowi-Maruf menjadi indikator dalam membangun sebuah relasi politik tanpa adanya syarat yang berlaku.
4. Calon eksekutif yang terpilih harus memenuhi janji yang diberikan saat kampanye. Pun harus bisa memberikan timbal balik kepada kiai yang merupakan figur sentral dalam meraup keuntungan suara yang didapat. Karena kontribusi yang diberikan kepada kiai akan dialokasikan kepada umat atau masyarakat banyak. Agar tidak timbul kekecewaan dari masyarakat umum, dan khususnya warga yang memilih. Juga untuk menjaga relasi kedepannya.

5. Kiai harus bisa menggunakan politik tinggi sebagai acuan tekanan moral ketika pemerintah berhasil memutar roda kanan pemerintah dan nilai-nilai syariat menggerakkan roda pemerintah berupa nilai-nilai agama dari aturan tersebut. Kaitan antara agama dan politik dimasukkan ke dalam penerapan nilai-nilai agama tanpa mengorbankan struktur pemerintahan.

6. PWNU DKI harus lebih hati-hati lagi dalam pengambilan keputusan ketika hendak menentukan sikap politiknya, karena keterlibatan dari organisasi NU kedalam ranah politik memiliki dampak yang sangat besar dan tidak sebanding dengan apa yang NU serta warga nahdliyyin dapatkan.

7. Dimasa yang akan datang PWNU DKI dianggap perlu untuk melakukan sebuah revitalisasi peran politik yang menyesuaikan zaman dan pilihan masyarakat yang semakin menuju kearah rasional.

5.2.2 Saran Teoritis

Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa relasi PWNU DKI dan Pasangan Jokowi-Maruf bisa dikatakan bentuk relasi yang sangat ampuh untuk menggalang massa. Penulis merekomendasikan kepada mahasiswa pada umumnya, dan khususnya mahasiswa ilmu politik UPNVJ agar lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kita sebagai masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam politik negara.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait relasi kuasa antara PWNU DKI dan Jokowi-Maruf dengan melakukan riset pada lebih banyak partai politik, baik partai agama atau partai nasional lainnya, agar data yang didapatkan lebih luas dan menyeluruh serta adanya perbandingan yang dapat dilakukan terkait relasi dari keduanya.

Selain itu, fenomena relasi PWNU DKI dengan Jokowi-Marif merupakan hal yang menarik untuk di teliti. Karena culture patron klien yang terjadi di NU seringkali dijadikan saeana sebagai kendaraan basis masa partai politik. Maka dari itu penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar lebi mengembangkan penelitian ini agar dapat menjadi perbandingan atau pendukung ketika nantinya digunakan untuk para kader nahdliyyin kedepannya.